



Administratio:

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Volume 13 (2) 2022: 177-190

P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977

DOI: 10.23960/administratio.v13i2.325

Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)



ARTICLE



Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda

Erna Rochana¹, Ani Agus Puspawati², Vina Karmilasari^{3*}, Damar Wibisono⁴

^{1,4} Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

^{2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

How to cite: Rochana, E., Puspawati, A.A., Karmilasari, V., Wibisono, D., (2022) Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(2)

Article History

Received: 29 Agustus 2022

Accepted: 10 Oktober 2022

Keywords:

*Civil Society
Economic Recovery
Collaboration*

Kata Kunci:

*Civil Society
Pemulihan Ekonomi
Kolaborasi*

ABSTRACT

The Sunda Strait tsunami left trauma and had an impact on the community's economy. BNPB has a mission to recover post-disaster areas with good recovery through multi-stakeholder collaboration. The Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) is one of the institutions that play a role in economic recovery after the Sunda Strait tsunami disaster. This study aims to examine the role of IIBF in realizing economic recovery after the Sunda Strait tsunami disaster in South Lampung Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the study show that the post-Sunda Strait tsunami economic recovery carried out by IIBF involves two partners, namely: fostered partners (affected people) and "stakeholder" partners. Through stakeholder collaboration, togetherness emerges in dealing with various problems, various risks, meeting resource needs, as well as responsibilities and rewards expected by each group member. Collaborative governance is important and needed to deal with various problems that occur as a result of disasters.

ABSTRAK

Bencana tsunami Selat Sunda meninggalkan trauma dan berdampak pada perekonomian masyarakat. BNPB memiliki misi pemulihan daerah pascabencana dengan *recovery* yang baik melalui kolaboratif multi stakeholder. Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) merupakan salah satu lembaga yang mengambil peran dalam pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran IIBF dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan dua mitra, yaitu: mitra binaan (warga terdampak) dan mitra "stakeholder". Melalui kolaborasi *stakeholder*, muncul kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tata kelola pemerintah kolaboratif menjadi penting dan dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencana.

* Corresponding Author

Email : vina.karmilasari@fisip.unila.ac.id

A. PENDAHULUAN

Longsor bawah laut dan letusan Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018 menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoreksi jumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana tsunami di Selat Sunda. Sejumlah 426 orang tewas, 7.202 luka-luka, dan 23 dikabarkan hilang. Wilayah Pandeglang dan Lampung Selatan menjadi korban paling banyak (Hakim, 2018). BNPB melaporkan bahwa tsunami merusak 2.52 rumah, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu serta kapal rusak, dan sebanyak 147 kendaraan rusak (nasional.kompas.com, 2018). Adanya bencana tsunami tersebut mengakibatkan dampak trauma dan penurunan perekonomian dalam masyarakat (Harsiti et.al, 2021). Pasca kejadian tersebut di masa tanggap darurat, tim BNPB melakukan koordinasi serta melakukan pendataan kerugian akibat adanya tsunami Selat Sunda. Pemerintah daerah terus mendapat pendampingan dari BNPB dan Kementerian atau Lembaga terkait seperti TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan lain-lain (jambi.antaranews.com, 2018). Selain itu, BNPB mengorganisir baik aspek ekonomi masyarakat maupun cara-cara baru mencari nafkah warga yang direlokasi (Tribun News, 2019).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Definisi bencana memiliki tiga aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: 1) peristiwa yang mengakibatkan gangguan atau ancaman, 2) peristiwa atau gangguan tersebut mengancam manusia dan lingkungan, 3) menyebabkan korban dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangi gangguan tersebut. Bencana dapat menyebabkan timbulnya kerentanan, yaitu menurunnya ketahanan masyarakat untuk bangkit kembali dari bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Kerentanan terjadi akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan (Abast, Moniaga & Gosal, 2016). Bencana menimbulkan ancaman bagi masyarakat dalam bentuk kerugian manusia (kematian, cedera, penyakit, atau ancaman kehidupan), kerugian psikologis (melalui perasaan tidak aman atau takut akan bahaya yang akan segera terjadi), kerugian fisik (melalui pemindahan atau perusakan properti), dan gangguan kehidupan masyarakat (melalui kegiatan yang berkurang atau terhenti).

Adanya ketahanan masyarakat dapat mengurangi ancaman ini (Kementerian Kesehatan, 2017). Karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara penurunan risiko bencana dan keberhasilan program pemulihan ekonomi, maka diperlukan lebih banyak fokus pada pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur fisik (Usadi & Sudibya, 2019). Korban tewas, kerusakan properti, dan kerugian bisnis adalah dampak yang didapat oleh masyarakat yang terkena bencana. Pemulihan ekonomi untuk daerah yang terkena bencana sangat penting. Mereka yang telah menderita bencana alam dapat mengambil salah satu dari empat jalan menuju kebangkitan ekonomi. Pertama, penting adanya konsensus bersama melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Kedua, memastikan bahwa tujuan kebijakan dipenuhi secara konsisten dengan cara implementasinya. Ketiga, perlu terjadi komunikasi dua arah di sejumlah lokasi. Keempat, kepemimpinan yang kuat dan keterampilan manajerial di semua sektor untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi lokal (www.kemenkopmk.go.id, 2021).

Sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun setelah tsunami Selat Sunda meluluhlantahkan Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai amanat peraturan BNPB nomor tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan tahun 2019-2020 harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan aman. Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga akademik, dan lembaga swadaya masyarakat di Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama merencanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami dalam rangka memperkuat saling pengertian dan komitmen untuk memulihkan semua aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan yang terganggu oleh bencana di Kabupaten Lampung Selatan, memberikan gambaran yang akurat kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dilakukan untuk mencegah duplikasi upaya (Maryanti et al, 2020).

Tujuan utama BNPB adalah memfasilitasi kerjasama lintas sektoral pascabencana, dengan tujuan memulihkan daerah yang terkena bencana ke kondisi sebelum bencana atau lebih baik. Upaya koordinasi antara perencana, pembuat kebijakan, masyarakat internasional, dan masyarakat lokal merupakan tantangan utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana (lipigo.id). Fokus utamanya adalah membina koordinasi yang aktif di antara semua pihak dan memperkuat kerjasama dan kelembagaan antar pemerintah daerah yang melibatkan sektor swasta. Widyastuti (2012) berpendapat bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan kegiatan pengelolaan yang tidak dapat semata-mata mengandalkan kemampuan pemerintah. Ini karena pemerintah memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas, serta kendala fisik dan logistik. Sangat penting bahwa semua sektor masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana, bukan hanya pemerintah.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat telah muncul sebagai standar baru. Menurut Humaedi (2021), gotong royong baik dalam bentuk organis maupun sistematis merupakan sarana membina kerjasama yang saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terlibat. Penanggulangan bencana sebenarnya sangat dipengaruhi oleh proses penanggulangan bencana yang melibatkan banyak pihak (Maifizar et.al, 2019). Pemulihan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan dari bencana tsunami 2004 di Selat Sunda merupakan upaya masyarakat dan institusi. *Indonesian Islamic Business Forum* merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ikut ambil bagian (IIBF). *Indonesian Islamic Business Forum* merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pemulihan ekonomi pascabencana dan membantu serta mendorong masyarakat yang terkena dampak bencana untuk mengembangkan kekuatan pribadi dan kemandirian ekonominya. Institusi masyarakat tidak hanya membantu publik mengawasi pemerintah dengan negara untuk mengimplementasikan perubahan dalam bentuk inisiatif pembangunan memberikan umpan balik atas kebijakan dan inisiatifnya, tetapi mereka juga bekerja sama dengan negara untuk mengimplementasikan perubahan dalam bentuk inisiatif pembangunan resmi (Maifizar et.al, 2019).

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kontribusi masyarakat madani, khususnya *Indonesian Islamic Business Forum* (IIBF), terhadap realisasi pemulihan ekonomi di Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan, pasca bencana tsunami Selat Sunda.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Civil Society

Civil Society atau yang biasa disebut dengan masyarakat madani merupakan sebuah konsep masyarakat yang memiliki variasi makna. *Civil society* berkembang seiring dengan

dinamika pemikiran dan faktor-faktor yang melingkupi konteks penerapannya, makna masyarakat sipil berubah dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, menurut Karni (1999: 2), setidaknya ada lima model pemaknaan masyarakat madani yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat madani identik dengan negara. Masyarakat madani, menurut para pemikir seperti Cicero, Aristoteles, Thomas Hobbes, dan John Locke, hanyalah tahap lain dalam perkembangan masyarakat manusia dan dengan demikian pada dasarnya setara dengan negara.
2. Adam Ferguson (1767) mendefinisikan masyarakat madani sebagai visi etis dalam kehidupan sosial untuk memelihara tanggung jawab sosial, yang dicontohkan oleh solidaritas sosial dan diilhami oleh sentimen moral dan rasa cinta yang alami di antara warga negara. Masyarakat madani yang dianggap beradab dikontraskan dengan masyarakat yang dianggap primitif atau barbar.
3. Masyarakat madani, menurut Thomas Paine (1792), adalah kebalikan dari negara. Kontrol kepentingan diri negara oleh masyarakat madani.
4. Ada penekanan pada "elemen ideologis kelas dominan" dalam interpretasi. Masyarakat madani, sebagaimana didefinisikan oleh George William Federich Hegel (1770-1831), adalah entitas yang memiliki kecenderungan untuk melumpuhkan dirinya sendiri, sehingga memerlukan kontrol hukum, administratif, dan politik dari negara. Menurut Karl Marx (1818-1883), masyarakat tanpa kelas tidak dapat dicapai selama masyarakat madani ada karena ia adalah masyarakat borjuis. Ketika membandingkan masyarakat madani dan masyarakat politik, yang oleh penulis Antonio Gramsci (1937) disebut sebagai negara, Gramsci (1937) memahami masyarakat madani dari perspektif ideologis. Pandangannya adalah bahwa negara pada akhirnya akan menyatu dengan masyarakat madani, sehingga melahirkan masyarakat yang lebih teratur.
5. Alexis 'De Tocqueville, dalam interpretasi kelimanya, melihat masyarakat madani sebagai penyeimbang otoritas negara. Hegel berpendapat bahwa masyarakat madani tidak secara inheren tunduk pada negara, melainkan memiliki tingkat otonomi dan kapasitas politik yang cukup untuk bertindak sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan negara untuk campur tangan.

Sampai sekarang, konsep masyarakat madani dipahami secara berbeda di antara para intelektual tergantung pada sudut pandang siapa yang dianut. Dalam hal ekonomi dan pertumbuhan masyarakat madani yang kuat, pendekatan Hegelian menempatkan kelas menengah dan memberdayakan individu untuk mengambil alih kehidupan mereka sendiri. Untuk memerangi ideologi yang didukung negara, digunakan metode Gramscian. Toqueville berpendapat bahwa cara terbaik untuk menumbuhkan pola pikir demokratis adalah dengan membentengi lembaga-lembaga sipil dan menanamkan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai kewarganegaraan (Hikam, 1999). Masyarakat madani didefinisikan juga sebagai tatanan sosial yang ditandai dengan tingkat mobilitas dan kerja sama yang tinggi di antara semua segmen penduduk yang bertindak atas kemauan mereka sendiri (Suryanto, 2018). Toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme sektor publik, kesukarelaan, swasembada, kemandirian, otonomi, konstitusionalisme adalah prinsip-prinsip masyarakat madani (Fitria & Sutrisnowati, 2013).

Istilah "masyarakat madani" mengacu pada wilayah antara negara dan masyarakat di mana warga negara secara sukarela berorganisasi ke dalam kelompok-kelompok dan membangun jaringan saling ketergantungan di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat madani merupakan suatu tatanan antara negara dengan berbagai kelompok sosial dan gerakan sosial yang otonom. Salah satu definisi masyarakat madani adalah kumpulan organisasi sukarela berbasis masyarakat yang ada dan terpisah dari otoritas negara. Mereka mampu mengadvokasi tujuan mereka karena ada ruang publik untuk melakukannya. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari masyarakat madani antara lain

LSM, kelompok sosial keagamaan, asosiasi, dan jenis kelompok kepentingan lainnya (Suryanto, 2018).

Kolaborasi

Kata "kolaborasi, berasal dari bahasa Latin yaitu "*collaborative*" yang memiliki arti "bekerja sama" (Merriam-Webster). Kolaborasi didefinisikan sebagai "bekerja sama, terutama dalam upaya menghasilkan produk mental yang bersatu" oleh American Heritage Dictionary (2000). Kolaborasi memungkinkan pihak untuk memeriksa masalah dari perspektif yang berbeda, menemukan kesamaan, dan mengeksplorasi solusi potensial. Kerja lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, lintas organisasi, lintas negara sering dilakukan melalui kolaborasi (Oleary, 2010). Roschelle dan Teasley yang mengatakan bahwa *collaboration more specifically as "mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together* (Lai, 201). Berkolaborasi berarti berkumpul untuk memecahkan masalah, mengambil risiko, memenuhi kebutuhan sumber daya, dan membagi balas jasa. Selain itu, kolaborasi memerlukan proses di mana semua pihak terlibat secara aktif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika dua orang atau lebih atau lembaga bekerja sama dalam suatu tugas yang signifikan, mereka berkolaborasi karena mereka telah menyadari nilai bekerja sama dalam masalah yang dihadapi dan telah menerima kebutuhan untuk melakukannya.

Terlepas dari berbagai cara kolaborasi dapat dijelaskan, kolaborasi selalu beroperasi pada prinsip dasar yang sama. Ini termasuk bekerja sama, berbagi tugas dan tanggungjawab, dan mencapai consensus. Menurut Fendt dalam (Arrozaaq, 2017), terdapat tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu: organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri; organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar. Dengan bekerja sama dapat mempercepat kemajuan menuju tujuan bersama. Memang, tidak disarankan agar tugas yang dilakukan oleh masing-masing pihak dibagi-bagi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Berbagai masalah yang berat dan pelik tidak dapat diselesaikan tanpa partisipasi dan intervensi pihak lain. Oleh karena itu, pembentukan kerjasama dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang besar, beban dana yang besar, penyediaan aset kerja, atau untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kolaborasi memiliki sebelas manfaat, menurut Valdellon (2017) antara lain meningkatkan fleksibilitas organisasi, menghubungkan pekerja bersama, memperlakukan karyawan secara sehat, mengadakan rapat koordinasi yang produktif, semakin memperkuat penciptaan talenta tinggi, dan mempercepat kemajuan bisnis. Berkolaborasi memiliki banyak keuntungan, seperti dapat membantu memecahkan masalah dengan lebih cepat, akurat, dan menyeluruh karena mengumpulkan sumber daya dan keahlian dari semua yang terlibat.

Pemerintahan Kolaboratif

Paradigma baru administrasi publik mencakup tata kelola kolaboratif. Konsep *Collaborative Governance* mencontohkan cara demokratis dalam melakukan sesuatu dengan mengundang semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk terlibat dalam menangani setiap masalah yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah (Fredericson, 1991 dalam Tando et al, 2019). Tata kelola kolaboratif sangat penting ketika ada tanda-tanda peringatan bahwa implementasi program hilir gagal dan menghabiskan uang negara. Menanggapi kekurangan ini, para aktor mengembangkan mekanisme yang disebut tata kelola kolaboratif (Turner et. al, 2015). Pendekatan ini membantu semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka dan menciptakan landasan bersama dengan meminimal kan potensi konflik dalam lingkup pengaruh mereka (Shrestha, 2017). Menurut

Emerson (2012), rezim tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai kebijakan publik dan proses dan struktur manajemen yang secara konstruktif melibatkan orang-orang melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, sektor publik, sektor Swasta, dan masyarakat madani untuk mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai.

Inti dari gagasan kolaborasi adalah gagasan tentang proses berulang di mana prinsip-prinsip keterlibatan (komunikasi), motivasi bersama (kepercayaan, komitmen, mutualitas), dan kapasitas untuk tindakan kolektif (administrasi) memperkuat satu sama lain dalam lingkaran umpan balik positif untuk meningkatkan kualitas dan dinamika administrasi yang berkuasa kolaborasi. Pemerintah membuat kebijakan yang dapat diterapkan pada setiap masalah; dalam hal ini kebijakan memungkinkan partisipasi penuh aktor, pemanfaatan sumber daya, keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan sinergi antar level aktor terkait (Tresiana & Duadji, 2017). Salman (2012) berpendapat bahwa bekerja sama dapat memiliki efek multiplikasi pada kemajuan. Sumber daya dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk sumber daya alam, sumber daya moneter, aset manusia, dan properti fisik. Kelompok atau aktor yang memainkan peran mereka melalui koordinasi dan penyatuan sumber daya disebut sebagai "organisasi". Norma adalah ukuran seberapa baik mekanisme dipatuhi dan berfungsi sebagai standar pedoman untuk tindakan.

Dari tata kelola kolaboratif, enam model berbeda muncul (Ansell & Gash, 2007:543-571) yaitu (1) forum publik atau lembaga publik didirikan, (2) aktor non-pemerintah disertakan dalam forum, (3) anggota forum dapat mengambil keputusan secara langsung berdasarkan keputusan bersama, (4) forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara berkala, (5) kewenangan pengambilan keputusan berada di forum, dan (6) Keputusan bersifat dibuat berdasarkan musyawarah. Pemerintah dapat mencapai tujuan masyarakat melalui kombinasi strategi kolaboratif dan kerangka kelembagaan (Sujinaka et al., 2013). Peran pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi sangat beragam, antara lain sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana program. Pemerintah sebagai pemain utama harus berdedikasi untuk menjalankan perannya jika para aktor ingin bekerja sama dengan baik (Kasna, 2022). Pemerintah federal mengadopsi kebijakan pemulihan ekonomi yang komprehensif, yang membutuhkan bantuan dari pemerintah negara bagian dan lokal yang memainkan peran penting dalam pelaksanaannya (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Kebijakan Penanggulangan Bencana

Bencana alam merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang paling mungkin bagi keamanan nasional karena berpotensi menghancurkan setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UU No. 24 Tahun 2007 menguraikan strategi pemerintah dalam menangani bencana alam. Komponen penanggulangan bencana meliputi pembuatan kebijakan pembangunan rawan bencana, pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana, pengelolaan keadaan darurat, dan pembangunan kembali kawasan yang rusak. Ada tiga tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Setelah bencana alam, daerah yang rusak dibangun kembali dan dipulihkan. Di daerah-daerah yang dilanda bencana, tujuan rehabilitasi adalah agar secepat mungkin kehidupan pemerintahan dan masyarakat kembali normal. Contoh kegiatan rehabilitasi meliputi pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; pemulihan keamanan dan ketertiban; penyediaan perawatan kesehatan, fasilitasi rekonsiliasi dan penyelesaian konflik; pemulihan kehidupan ekonomi dan budaya; pemulihan lingkungan di daerah yang terkena dampak; dan peningkatan perumahan masyarakat. Rekonstruksi adalah proses membangun kembali seluruh prasarana dan sarana kelembagaan di wilayah pasca bencana, di tingkat pemerintah dan masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, memelihara hukum dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut setelah peristiwa bencana.

Memperbaiki infrastruktur yang rusak; memulihkan fasilitas sosial masyarakat yang rusak; menghidupkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; memanfaatkan desain yang tepat dan menggunakan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana: melibatkan dan meminta bantuan dari lembaga dan organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat; perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya merupakan contoh kegiatan pembangunan yang baik yang dilakukan pada masa rekonstruksi. Pemulihan pasca bencana untuk mengurangi keparahan bencana di masa depan dengan menghilangkan faktor-faktor risiko dan menopang kekuatan masyarakat yang terkena peristiwa destruktif. Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renaspb) 2020-2024 memuat forum kerjasama non pemerintah yang menjadi instrumen pengarusutamaan target RENAS PB di lembaga non pemerintah. Tujuan dari platform ini adalah untuk mendokumentasikan semangat dan upaya lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap realisasi tujuan RENAS PB.

Menggunakan Laporan Tahunan Lembaga/Lembaga Non-Pemerintah yang berpartisipasi, Forum Kolaborasi Non-Pemerintah juga melacak dan menandai kemajuan menuju target RENAS PB. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Akademisi; pakar; ahli; Bisnis; Bisnis dan Lembaga Filantropi; Organisasi Masyarakat Sipil; Agensi Media semuanya menjadi sasaran pengarusutamaan. OMS dan lembaga media masing-masing memiliki metode sendiri dalam mengalokasikan dana dan membuat rencana jangka panjang. Dengan demikian, cara pengarusutamaan RENAS PB di berbagai lembaga berbeda-beda sesuai dengan sifat, status, dan lokasi lembaga tersebut. OMS dan lembaga media dapat berkontribusi pada proses komunikasi risiko dengan melaporkan contoh-contoh manajemen apa yang baik dan membantu membentuk kebijakan terkait manajemen bencana.

Organisasi berbasis masyarakat (CBO) dan organisasi media (MMO) harus menawarkan bimbingan dan saran selama pengembangan strategi penanggulangan bencana dan ditugaskan untuk mengoordinasikan inisiatif penanggulangan bencananya dengan inisiatif RENAS PB di wilayah di mana upaya kedua organisasi tersebut tumpang tindih. Kesesuaian ini tidak hanya ada pada tingkat tujuan dan strategi, tetapi juga pada keseluruhan Aksi Penanggulangan Bencana. RENAS PB dilaksanakan dengan upaya sinkronisasi dari CSO dan lembaga media berkat koordinasi dengan BNPB. Khusus untuk lembaga global, lembaga terafiliasi dapat menangani proses koordinasi. Pelaksanaan RENAS PB berada di bawah lingkup OMS dan lembaga media adalah tanggung jawab mereka untuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan rencana kerja mereka.

C. METODE

Metode penelitian untuk penelitian ini adalah kualitatif dan teknik analisisnya adalah deskriptif. Baik sumber primer maupun sekunder digunakan untuk menyusun laporan ini. Data primer berasal dari wawancara mendalam dan observasi cermat yang dilakukan di lapangan. Sedangkan, informasi sekunder dikumpulkan dari sumber seperti buku yang diterbitkan, artikel ilmiah, foto, dan catatan lainnya. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan dengan teknik *snowball sampling*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran IIBF dalam Pemulihan Ekonomi Pascabencana Tsunami Selat Sunda

Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana prinsip-prinsip moral dijunjung tinggi melalui visi forum "Membangun Karakter dan Kekayaan", khususnya dengan mengembangkan karakter pemilik bisnis Muslim yang berperilaku sebagai pengusaha kelas dunia dan muslim yang taat. Secara nasional, IIBF berdiri pada tahun 2009, dan di Provinsi Lampung berdiri pada tahun 2011.

Meski mirip dengan komunitas yang memfasilitasi dialog terbuka, IIBF lebih menekankan pada pengembangan kualitas pribadi anggota sebagai pebisnis. Sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri atau di luar pengaruh negara, IIBF adalah contoh masyarakat madani karena memungkinkan warga bersuara dalam debat publik dan forum untuk mengadvokasi hal-hal yang mereka pedulikan (Suryanto, 2018). Toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme ruang publik, kesukarelaan, swasembada, kemandirian, otonomi, konstitusionalisme, dan sebagainya merupakan beberapa prinsip yang ditekankan oleh masyarakat sipil (Fitria & Sutrisnowati, 2013).

Salah satu kelompok yang membantu pemulihan ekonomi pasca tsunami Selat Sunda adalah *Indonesian Islamic Business Forum* (IIBF). Masyarakat yang terkena dampak membutuhkan bantuan dari berbagai organisasi, termasuk organisasi masyarakat, dalam proses pemulihan jangka panjang setelah bencana (Islam et.al, 2017). Perlu adanya bantuan dari instansi pemerintah atau lembaga lain dalam upaya pembangunan kembali pasca bencana karena potensi korban jiwa dan material akibat bencana alam (smail et. al., 2014). Mengambil pendekatan berbasis masyarakat selama fase pemulihan pasca bencana dapat mengurangi dampak bencana di masa depan (Lin, 2019). Pemulihan ekonomi dari bencana tidak hanya membutuhkan peningkatan fisik, tetapi juga mental.

Peran IIBF adalah sebagai teman, mendorong mereka yang terkena dampak untuk menemukan cara mengatasi keadaan mereka dan menjadi mandiri. Tujuan pendampingan intensif ini adalah untuk memperkuat karakter dan kapabilitas. Setiap tahapan rekonstruksi pasca bencana harus memperhitungkan kontribusi yang diberikan oleh organisasi masyarakat setempat (Kutty, 2018). Selain itu, IIBF mendorong masyarakat yang terkena dampak tsunami Selat Sunda untuk mengubah kehidupan mereka dan membuat perubahan positif sehingga mereka dapat menopang diri secara ekonomi. Ungkapan *move on* merangkul semangat kemajuan. Cara pandang, sikap, dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dapat diubah melalui manajemen bencana yang proaktif, komprehensif, dan berpusat pada manusia (Passigli & Biondi, 2015). MBE mengambil pendekatan pembangunan yang memusatkan upaya pemrogramannya pada inisiatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan kompetensi lokal (Eliot, 1987 dalam Maifizar et. al, 2019).

Kolaborasi dalam Pemulihan Ekonomi Pascabencana Tsunami Selat Sunda

Pelaksanaan pemulihan ekonomi pasca bencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan masyarakat lokal dalam implementasinya. Pihak yang terlibat (mitra) IIBF dalam pemulihan ekonomi ada dua:

- 1) Mitra binaan yaitu warga yang terdampak. Mitra binaan IIBF adalah korban terdampak tsunami selat sunda di Kabupaten Kalianda yaitu warga Kalianda bawah, Waymuli, Kunjir, Sebesi. Terdapat 66 pelaku usaha terbagi dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Pelaku usaha tidak harus membuka usaha yang baru. Setiap mitra yang masih memungkinkan melanjutkan usaha sebelumnya didorong untuk bangkit dengan jargon "*Move On*". Gerakan mulai berbenah "*Move on*" memberikan semangat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi dan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga bisa mandiri. Pendampingan IIBF dilakukan secara intens dengan tujuan membangun karakter dan kapasitas. IIBF melaksanakan kegiatan menggunakan pendekatan konsep agama dengan membangun mindset "*move on* dilandasi dengan iman dan taqwa. Dari 66 pelaku usaha mitra binaan tersebut dapat menghasilkan 5 pelaku usaha sebagai penggerak.
- 2) Mitra "*stakeholder*" yaitu jamaah masjid sholat shubuh, ta'mir masjid sekitar area bencana, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku usaha setempat, kepala desa, camat, bupati dan Lembaga terkait. Pertemuan stakeholder dilakukan secara intensif. Salah

satu produk rengginang sea food merupakan kolaborasi antara IIBF, Universitas Lampung, dan BNPB.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi pasca bencana yang dilakukan oleh IIBF dimaksudkan untuk percepatan pencapaian tujuan. Manfaat yang diperoleh dan kolaborasi adalah mengumpulkan berbagai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang berkolaborasi sehingga dapat mempercepat penanggulangan masalah secara cepat dan tepat. Melalui kolaborasi, dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang besar atau permasalahan berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individu atau satu organisasi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan suatu organisasi perlu melakukan kolaborasi, karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu tanpa bantuan dari pihak lain (Arrozaq. 2017). Upaya yang dilakukan IIBF dalam memberikan pendampingan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak tsunami Selat Sunda menggunakan *Platform Social Recovery* sebagai berikut:

1. Masjid

Assessment awal dilakukan agar mendapatkan data yang valid. Dalam mencari mitra binaan memilih pelaku usaha dengan pendekatan agama, melihat siapa yang sholat subuh di masjid. Relawan IIBF melakukan wawancara serta dan pelaku diskusi usaha dengan lokal jamaah masjid untuk menentukan mitra yang akan dibina dan logistik serta bantuan pelatihan untuk membangun mentalitas membangun usaha.

2. Madrasah

Memonitoring pelaksanaan kegiatan usaha dengan menerapkan 7 Formulasi Buka Langsung Laris:

a) Bidik Pasar Potensial

Bidik pasar potensial memperhatikan 3 hal yaitu, 1) Bleending, dengan berani menurunkan harga karena persaingan yang ketat. 2) Potensial, adanya permintaan produk, namun belum banyaknya kompetitor. 3) Sleeping, market yang pasarnya belum terlihat permintaannya dan belum ada kompetitor, tetapi bisa diedukasi.

b) Produk Ngangenin

Produk ngangenin sangat diminati dan sering dicari oleh konsumen. Merek ini berpotensi meledak. Cara mengujinya yaitu 1) Carilah orang yang sesuai dengan profil pelanggan ideal. 2) Tawarkan sampel diskon atau gratis tanpa memerlukan ulasan sebagai gantinya. 3) Minta item diambil. 4) Mencari kritik dan umpan balik. 5) Melakukan modifikasi.

c) Kemasan Pertama Diambil

Sejauh mana daya tarik visual dari kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut secara impulsif. Profitabilitas suatu produk dapat sangat bervariasi tergantung pada kemasannya. Pepatah lama, "Jangan menilai buku dari sampulnya," mungkin tidak selalu menguntungkan bisnis ketika berhadapan dengan klien atau pelanggan potensial.

d) Merek yang Ngetop

Merek yang memiliki penafsiran yang berbeda dibenak konsumen dapat berdampak pada omzet penjualan. Poin-poin yang perlu diperhatikan pada pemilihan merek adalah: 1) Sesuai target pasar. 2) Unik. 3) Mudah untuk diucap dan diingat. 4) Hindari singkatan konsonan. 5) Hindari angka. 6. Terasosiasi dengan diferensiasi. 7) Kata kunci.

e) Saluran Distribusi

Saluran distribusi adalah perusahaan yang berfungsi untuk menyalurkan produk/jasa dari produsen ke konsumen. Tugas promosi adalah mengkampanyekan eksistensi merek atau produk dengan kelebihan yang dimiliki. Pro dan beralih merek. tanpa distribusi yang merata, menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk dan beralih merek.

f) Penyebar virus

Penyebar virus mendongkrak permintaan, mempercepat proses tren, bahkan mampu menciptakan permintaan pasar di pasar yang masih tertidur. Dengan mengendorse bintang atau seseorang yang bisa dipercaya oleh sekelompok kaum, komunitas yang memiliki persamaan dan saling terhubung sesuai dengan target pasar yang dimiliki, dan media sosial untuk pemasaran yang mudah dan terarah.

g) Lompatan Konversi

Produk yang ngangenin, kemasan yang menjual, merek yang ngetop, distribusi yang merata, virus yang menyebar, tanpa konversi, jika tak ada transaksi ujungnya hanya sia-sia. Ujung dalam jualan adalah penutupan. Terdapat 4 faktor lompatan konversi, yaitu: 1) Sarang yang benar. 2) Strategi harga. 3) Ikatan distributor. 4) Momentum.

3. Market

Platform market membantu memberi pemahaman terkait literasi pasar, dasar pencatatan keuangan namun belum pada tingkat keuangan akuntansi, memberi kan pemahaman penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP), membantu memberikan informasi terkait pasar, dan pembinaan dalam pengelolaan pasar.

Membangun kembali ekonomi setelah bencana alam adalah tugas rumit yang membutuhkan strategi komprehensif (Passigli & Biondi, 2015). Yang terpenting warga bisa terlibat dengan kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat sipil (Syal et.al, 2021). Beberapa faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan pemulihan Jangka pendek antara lain rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, kapasitas masyarakat yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi (Ali et.al, 2020). Melalui mekanisme internalnya sendiri, komunitas atau lembaga masyarakat membantu membentuk misi dan tujuan organisasi, membina hubungan saling percaya dan kerjasama antara organisasi dan pemerintah (Alamsyah et.al, 2020). Pada intinya, pemulihan pasca bencana tidak hanya mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana (pemulihan), tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang (pembangunan kembali) (Nazamuddin, 2007). Kohesi sosial sangat penting untuk pemulihan jangka panjang dalam masyarakat yang terus berkembang. Jadi penting bahwa pemulihan memperhitungkan efek dari berbagai jenis modal sosial dari waktu ke waktu (Monteil, Simmons & Hicks, 2019).

Solusi paling sederhana dari permasalahan bencana yang kompleks di Indonesia adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas untuk merespons (Yulianto et.al, 2021). Asy'ari (2018) berpendapat bahwa modal sosial menawarkan alternatif yang layak untuk pengalokasian sumber daya yang lebih efektif. Dalam masyarakat dengan berbagai tipe orang, modal sosial bertindak sebagai perekat yang penting (Putnam, 1995). Manusia mengembangkan modal sosial mereka melalui interaksi, banyak di antaranya terjadi dalam pengaturan terstruktur seperti klub dan organisasi. Peningkatan output, peningkatan tingkat kesukarelaan, dan kepedulian terhadap kebaikan bersama adalah semua manfaat dari modal sosial. Interaksi antar individu menghasilkan modal sosial. Modal sosial juga dapat dikembangkan dengan berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat. Selama proses pembangunan kembali, penelitian Aldrich (2011) tentang gempa bumi, Kobe 1995 menemukan hubungan yang positif dan kuat antara modal sosial dan respons penduduk (Hsin, 2019).

Menurut hasil penelitian ini, modal sosial didefinisikan sebagai saluran ke dalam sumber daya yang melekat pada jaringan sosial. Tanpa bantuan publik, pemerintah tidak dapat secara efektif mengelola bencana sebelum, selama, dan setelah terjadi. Waktu yang dibutuhkan masyarakat sipil untuk mengorganisir kesepakatan kemitraan bersama tentang isu-isu seperti evakuasi, perawatan dan pengobatan medis, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya setelah bencana alam relatif singkat (Efendi et.al, 2019). Jika kita ingin secara efektif mengatasi berbagai masalah yang muncul setelah bencana, kita membutuhkan

pemerintah yang mampu bekerja sama untuk melakukannya dengan cepat, fleksibel, penuh semangat, dan tanpa lelah. Untuk pemulihan ekonomi pasca bencana, pemerintah harus mengerahkan seluruh peralatan, saran, dan infrastrukturnya di tingkat nasional dan daerah.

Sektor swasta dalam bentuk individu yang giat harus berperan membantu pemerintah dalam menangani bencana, baik dari segi sumber daya manusia yang berpengalaman maupun modal finansial. Khususnya pasca bencana, peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting. Tanggapan terhadap gempa bumi dan tsunami diinformasikan oleh pelajaran dari bencana sebelumnya di Indonesia dan di tempat lain. Jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masing-masing dapat melakukan perannya masing-masing dan menciptakan sinergi yang mengarah pada tumbuh dan berkembangnya implementasi investasi baru di daerah bencana, maka rekonstruksi pembangunan pasca bencana dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan akan memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan.

Forum kerja sama non-pemerintah masuk dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024. Forum ini merupakan instrumen pengarusutamaan target RENAS PB di lembaga non pemerintah. Dengan platform ini, kami berharap dapat merekam semangat dan upaya lembaga swadaya masyarakat terhadap tujuan RENAS PB. Berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga/Lembaga Non-Pemerintah yang berpartisipasi, Forum Kerja sama Non-Pemerintah juga melacak dan menandai kemajuan menuju target RENAS PB. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Akademisi; pakar, ahli; Bisnis; Bisnis dan Lembaga Filantropi; Organisasi Masyarakat Sipil; Badan Media merupakan sasaran dari upaya pengarusutamaan. Ketika pemerintah tidak mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan layanan warga, masyarakat madani yang melangkah untuk mengisi kekosongan tersebut (Lewis et.al, 2021). Setelah bencana alam, pentingnya upaya masyarakat tidak dapat ditinggalkan. Sementara kelompok-kelompok lokal mungkin ragu-ragu untuk mengambil kendali pembuatan kebijakan selama krisis, mereka berada dalam posisi yang baik untuk membuat keputusan tentang rute evakuasi dan bantuan makanan untuk para pengungsi.

Ketika bencana melanda dan pemerintah gagal merespons, organisasi non-pemerintah dan warga yang peduli turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut (Woodward, 2010). Pada hakikatnya pendekatan kesejahteraan atau membantu kelompok tertentu yang terkena bencana menunjukkan partisipasi sosial masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Eliot (1987) dalam Maifizar (2019). Metode ini bukan tentang memberi orang lebih banyak kekuatan atau lebih banyak kemampuan untuk mengumpulkan uang bantuan; sebaliknya, ini tentang memberi orang alat yang mereka butuhkan untuk menangani proses kemiskinan masyarakat. Strategi kedua adalah strategi pembangunan, yang memusatkan upayanya pada proyek pembangunan berbasis masyarakat melalui kegiatan program. Keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditingkatkan dengan adanya hubungan yang kooperatif, kooperatif, dan seimbang antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Maifizar et.al, 2019).

E. SIMPULAN

Pemulihan ekonomi pasca bencana tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan masyarakat madani. Kemampuan mengadvokasi kepentingan seseorang dimungkinkan dengan adanya masyarakat madani sebagai ruang perkumpulan masyarakat yang bersifat sukarela. Salah satu kelompok yang membantu pemulihan ekonomi pasca tsunami Selat Sunda adalah Indonesian Islamic Business Forum (IBF). Baik mitra binaan (warga terdampak) dan mitra "stakeholder (usaha lain) sangat penting bagi upaya pemulihan ekonomi IIBF pasca tsunami Selat Sunda. Kolaborasi pemangku kepentingan memupuk persatuan dalam menghadapi tantangan bersama, risiko, kebutuhan sumber daya, dan distribusi manfaat yang diharapkan. Sebagai akibat dari

berbagai masalah yang dapat muncul setelah bencana, tata kelola kolaboratif menjadi sangat penting.

REFERENSI

- Alamsyah, M N., Nawawi, M., Syamsiah, M Z. 2020. Gotong Royong of Civil Society : The Identity Struggle in Handling the Palu Valley Disaster Response. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 20 (2): 219-228.
- Ali, R A., Mannakkara, S., Wilkinson, S. (2020). Factors Affecting Successful Transition Between Post-disaster Recovery Phases: a Case Study of 2010 Floods in Sindh, Pakistan. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*. DOI:10.1108/IJDRBE-03-2020-0016
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.18 No.4, halaman 543-571.
- Ar Rozaaq, D.L.C. 2017. *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Asy'ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pascabencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(2): 153-168.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Efendi, D., Agustyara., Putra, HA. (2019). Natural Disasters Management and the Challenge of Governability in Indonesia. *Indian Journal of Public Administration*, 65 (3) :627-645. doi:10.1177/0019556119840953.
- Faedlulloh, D., Meutia, I. F., Yulianti, D., & Karmilasari, V. (2021). Gotong Royong Digital: Praktik Baru Solidaritas Warga di Era Pandemi. *Jantra.*, 16(1), 1-14.
- Fitria, V & Sutrisnowati, S A. (2013). Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
- Hikam, M A S. (1999). Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia . *Jurnal Paramadina*, 1 (2), 1999.
- Hsin- Yi Hsueh. (2019). The Role of Household Social Capital in Post Disaster Recovery: An Empirical Study in Japan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 39 (2019) 101199. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101199>.
- Islam, R., Walkerden, G., & Amati, M. (2017). , Households' Experience of Local Government During Recovery from Cyclones in Coastal Bangladesh: Resilience, Equity, and Corruption. *Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards*, 85 (1): 361-378.
- Ismail, D., Majid, T A., Roosli, R & Samah, N A. (2014). Project Management Success for Post-disaster Reconstruction Projects: International NGOs Perspective: *Procedia Economic and Finance*, 8 : 120-127.
- Jambi.antaranews.com. (2018). Korban Jiwa Tsunami Selat Sunda Bertambah Menjadi 222 Orang. Diakses dari <https://jambi.antaranews.com/berita/332637/korban-jiwa-tsunami-selat-sunda-bertambah-jadi-222-orang> pada Juni 2022.
- Karni, Asrori S. (1999). *Civil Society & Ummah*, Jakarta : Logos.
- Kutty, N F. (2018). NGOs in Post Disaster Reconstruction in Aceh. American-Eurasian Network for Scientific Information.
- Lai, E.R. (2011). *Collaboration a literature review: Research report*. Dikutip dari [https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaboration Review.pdf](https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Collaboration%20Review.pdf).

- Lin, P S. (2019). Building Resilience Through Ecosystem Restoration and Community Participation: Post-Disaster Recovery in Coastal Island Communities. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 39 (2): 101249.
- Lipi.go.id. Mempersiapkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana. Diakses dari <http://lipi.go.id/risetunggulan/single/mempersiapkan-ketahanan-masyarakat-menghadapi-bencana/13> pada Juni 2022.
- Maifizar, A., Tjoetra, A., Maulina, P. (2019). Model Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Aceh. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts*, 2 (3). DOI: 10.32734/lwsa.v2i1.585.
- Maryanti, M., Poli, DT., Julius, AM., Aminullah, AA., & Sandi, AW. 2020. Studi Lapangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh BPBD Provinsi Lampung Pascabencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018. *Jurnal Manajemen Bencana*, 6 (2), P: 25-40.
- Monteil, C., Simmons, P., & Hicks, A. (2019). Post-disaster Recovery and Sociocultural Change: Rethinking Social Capital Development for The New Social Fabric. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 42, 101356. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101356>.
- Nasional.kompas. (2018). Korban Meninggal Tsunami Selat Sunda Capai 437 Orang. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/15561231/korban-meninggal-tsunami-selat-sunda-capai-437-orang> pada Juni 2022.
- Nazamuddin. 2007. *Kebijakan Ekonomi untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana: Pelajaran dari Bencana Tsunami di Aceh*. Makalah dipresentasikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2007, diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dan LIPI.
- O'Leary, R., Van Slyke, D.M., & Kim, S. (2010). *The future of public administration around the world*. Washinton DC: Georgetown University Press.
- Passigli, D K., & Biondi, A. (2015). A People-centered, Preventive Approach to Disaster Risk, *Eruditio: e-Journal of the World Academy of Art and Science*, 1 (6): 32-39.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Salman, D. 2012. *Perencanaan Berbasis Komunitad dan Mekanisme Kolaborasi Serta Peran Fasilitator*. PT. Elex Media Komputindo.
- Shrestha, M. K. 2017. Network Structure, Strength of Relationship and Communitie's Success in Project Implementation. *Public Administration Review*, 78 (2), 1-28.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syal, R., Wessel, M V., & Sahoo, S. (2021). Collaboration, Co-Optation or Navigation? The Role of Civil Society in Disaster Governance in India. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization*, 32 (7).
- Tando, C E., Sudarmo., & Haryanti, R H. 2019. Pemerintahan Kolaboratif sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (3), 257-274.
- Tresiana, N., & Duadji, N. 2017. *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan*. Paper Presented at The Seminar Nasional Tentang Membangu Etika Sosial Menuju Masyarakat yang Berkeadilan, Lampung.
- Turner, M., Hulme, D., & McCourt, W. 2015. *Governance, Management and Development. Making The State Work*. London: Palgrave.
- Usadi, P A., & Sudibia. (2019). Analysis of the Effect of Government Role and Social Capital in Disaster Management on Economic Recovery of Disaster Victims iIn the Sarbagita Area of Bali Province. *RJOAS*, 7 (91): 235-247.

- Woodward, M. (2010). The mount of fire, Islam and local culture. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/22/the-mount-fire-islam-and-local-culture.html>
- Yulianto, S., Apriyadi, R.K., Aprilyanto., Winugroho, T., Ponangsera, I.S., Wilopo. 2021. Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA: Journal of Science and Education*, 5 (2), 180-187. DOI: <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.